

Sekuritisasi Bencana Dalam Rezim Kudeta : Analisis Copanhagen School Terhadap Penanganan Krisis Di Myanmar

Ian Ardiansyah¹

¹ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

ianardiansyah.014@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep sekuritisasi bencana dalam rezim kudeta Myanmar dengan menggunakan kerangka teori Copenhagen School yang diperluas oleh pendekatan sosiologis Thierry Balzacq dan sekuritisasi bencana dari Dorothea Hilhorst. Studi ini menunjukkan bagaimana rezim militer Myanmar merekayasa narasi ancaman terhadap bencana sosial dan politik pasca-kudeta sebagai alat legitimasi untuk memperkuat kontrol kekuasaan. Melalui metode kualitatif berbasis studi kasus dan analisis wacana terhadap dokumen kebijakan, pidato resmi, dan laporan lapangan, ditemukan bahwa proses sekuritisasi di Myanmar tidak hanya berlangsung secara diskursif, tetapi juga strategis dan represif. Narasi keamanan digunakan untuk menjustifikasi kebijakan darurat, membatasi akses bantuan kemanusiaan, serta mengeksklusi kelompok minoritas dari wacana kewarganegaraan. Penelitian ini mengungkap bahwa sekuritisasi dalam konteks otoritarianisme dapat berdampak negatif terhadap hak asasi manusia, melemahkan reformasi demokratis, serta menciptakan krisis kemanusiaan yang

berkelanjutan. Hasil ini menekankan pentingnya kritik terhadap penggunaan politik narasi keamanan dalam kebijakan publik dan mendorong perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis hak dalam penanggulangan krisis.

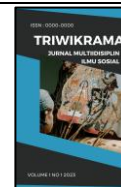
Kata Kunci: Sekuritisasi; Kudeta Myanmar; Copanhagen School; Krisis Kemanusiaan; Otoritarianisme

A B S T R A C T

This study examines the application of disaster securitization within the context of Myanmar's military coup regime, utilizing the Copenhagen School framework, further expanded by Thierry Balzacq's sociological approach and Dorothea Hilhorst's theory of disaster securitization. The research reveals how Myanmar's military regime strategically constructed social and political crises as existential threats, thereby legitimizing exceptional policies and consolidating authoritarian power. Through a qualitative methodology that combines case study and discourse analysis of policy documents, official speeches, and field reports, the study demonstrates that securitization in Myanmar operates not only discursively but also performatively and repressively. Security narratives are deployed to justify emergency policies, restrict humanitarian access, and exclude minority groups from national identity discourses. The findings underscore how securitization, in an authoritarian context, undermines human rights, hinders democratic reform, and exacerbates prolonged humanitarian crises. This research highlights the urgent need to critically assess political uses of security discourse and to promote inclusive, rights-based approaches to crisis management.

*Corresponding author

E-mail addresses: ianardiansyah.014@gmail.com



Keywords: *securitization; Myanmar coup; Copenhagen School; humanitarian crisis; authoritarianism*

1. PENDAHULUAN

Pada rezim kudeta di Myanmar telah membuka babak baru dalam dinamika politik dan penanganan krisis di negara tersebut. Salah satu fenomena penting yang muncul adalah penerapan konsep sekuritisasi bencana, di mana peristiwa bencana dan krisis dijadikan alat legitimasi bagi pengambil keputusan untuk memberlakukan kebijakan dan tindakan luar biasa. Artikel ini mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme sekuritisasi yang dipaparkan oleh Copenhagen School diterapkan dalam konteks rezim kudeta di Myanmar. Menurut Wæver, suatu isu menjadi isu keamanan bukan karena ancamannya yang inheren, tetapi karena dikonstruksi demikian melalui speech act (tindakan ujaran) oleh aktor tertentu, seperti pemerintah atau militer, yang memiliki kapasitas otoritatif dalam masyarakat (Wæver, 1995). Relevansi penelitian ini tidak hanya terletak pada analisis retorik, melainkan juga pada dampak nyata kebijakan yang berdampak pada akses kemanusiaan dan hak asasi. Di tengah proses sekuritisasi, banyak kritik menyatakan bahwa pendekatan tersebut justru dapat menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi manusia dan mempersulit upaya penanggulangan bencana secara konvensional.

Konteks krisis di Myanmar, terutama pasca kudeta yang semakin memperburuk kondisi sosial-politik, memberikan latar yang tepat untuk menguji sejauh mana narasi sekuritisasi mampu mengubah paradigma penanganan bencana. Dengan memanfaatkan data primer berupa analisis pidato, dokumen kebijakan, dan laporan lapangan, artikel ini mencoba menjelaskan bagaimana narasi tersebut terbentuk, siapa saja aktor-aktor utama yang terlibat, dan apa konsekuensi kebijakannya terhadap struktur sosial di Myanmar.

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis dokumen dan studi kasus. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder yang meliputi pidato pejabat, laporan organisasi kemanusiaan, dan artikel akademis terkini. Secara spesifik, analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Wacana:

Teknik ini digunakan untuk memeriksa bagaimana retorika yang digunakan oleh pemerintah dan aktor-aktor politik lainnya membingkai peristiwa bencana dan krisis sebagai ancaman keamanan.

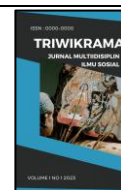
2. Studi Kasus:

Fokus studi kasus tertuju pada penanganan krisis di Myanmar pasca kudeta, dengan perhatian khusus pada kebijakan yang diterapkan terhadap kelompok minoritas dan respons internasional. Studi kasus ini mencakup analisis terhadap bagaimana krisis Rohingya telah disekuritisasi untuk membenarkan tindakan represif.

3. Analisis Kebijakan:

Dokumen-dokumen kebijakan dan laporan organisasi internasional dianalisis untuk menelusuri hubungan antara narasi keamanan, kebijakan darurat, dan dampak pada akses bantuan kemanusiaan. Analisis ini membantu memahami bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut saling terkait dan membentuk pola respons strategis.

Seluruh analisis dilakukan dengan berpijak pada kerangka teori sekuritisasi Copenhagen School dan konsep sekuritisasi bencana, yang menekankan pada peran wacana dalam mengkonstruksi ancaman serta dampaknya terhadap kebijakan keamanan dan kemanusiaan.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Mekanisme Sekuritisasi di Myanmar: Tinjauan Teoretis dan Empiris

Dalam menganalisis penanganan krisis di bawah rezim kudeta Myanmar, artikel ini menggunakan pendekatan teori sekuritisasi dari Copenhagen School, diperluas oleh pendekatan sosiologis Thierry Balzacq, serta diperkuat oleh teori sekuritisasi bencana dari Dorothea Hilhorst. Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk memahami bagaimana krisis sosial dan bencana dipolitisasi dan dikonstruksi sebagai ancaman eksistensial guna membenarkan tindakan represif dan kebijakan luar biasa.

Aktor Sekuritisator dan Objek Referensi

Menurut Copenhagen School, keamanan bukanlah kondisi objektif, melainkan konstruksi sosial melalui tindakan wacana (speech act)—di mana seorang aktor (dalam hal ini, militer Myanmar) menyatakan bahwa suatu isu (seperti oposisi politik atau kerusuhan sipil) merupakan ancaman terhadap “keutuhan negara” atau “identitas nasional”. Jika publik (audiens) menerima klaim tersebut, maka isu tersebut resmi masuk dalam wilayah sekuritisasi dan membolehkan tindakan luar biasa seperti darurat militer atau pembatasan hak sipil (Buzan et al., 1998). Konsep ini terwujud dalam praktik militer Myanmar yang menggunakan retorika seperti “krisis eksistensial” dan “ancaman dari dalam” untuk membingkai bencana sosial sebagai konspirasi yang mengancam kestabilan negara. Tindakan ini menjadikan stabilitas kekuasaan sebagai objek referensi utama yang “harus dilindungi dengan segala cara” (Buzan et al., 1998).

Tindakan Wacana dan Konteks Sosial: Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Copenhagen ini kemudian dikembangkan oleh Thierry Balzacq yang menekankan pentingnya konteks sosial, relasi kekuasaan, dan praktik diskursif dalam proses sekuritisasi. Dalam pendekatan sosiologis ini, tindakan sekuritisasi tidak hanya tergantung pada bahasa, melainkan juga bagaimana aktor politik menggunakan perangkat simbolik (dispositif) seperti metafora, emosi, dan stereotip untuk memengaruhi audiens secara strategis (Balzacq, 2011). Militer Myanmar, misalnya, tidak hanya mengeluarkan pernyataan resmi, tetapi juga menyebarkan narasi melalui media, simbol-simbol nasional, dan wacana kebudayaan yang menciptakan citra bahwa oposisi dan minoritas etnis merupakan “musuh internal”. Dengan begitu, proses sekuritisasi tidak hanya bersifat diskursif, tetapi juga performatif dan strategis—dirancang untuk mengarahkan tindakan represif dengan legitimasi politik (Balzacq, 2011).

Sekuritisasi Bencana dan Legitimasi Kekuasaan

Dorothea Hilhorst melengkapi analisis ini dengan konsep sekuritisasi bencana, yaitu proses ketika bencana atau krisis kemanusiaan dipolitisasi dan dikonstruksi sebagai ancaman keamanan. Menurut Hilhorst, dalam rezim otoriter, bencana kerap dijadikan alat untuk memperkuat kontrol negara dan menghambat partisipasi lembaga kemanusiaan (Hilhorst, 2013). Proses ini tidak hanya mengabaikan kebutuhan warga terdampak, tetapi juga membatasi akses bantuan dan memperkuat struktur kekuasaan yang eksklusif.

Di Myanmar, pendekatan ini terlihat dari langkah militer yang menutup akses bantuan kemanusiaan dan memberlakukan pembatasan gerak terhadap organisasi sipil. Melalui narasi bahwa “krisis sosial dan bencana adalah ancaman terhadap negara”, rezim membangun justifikasi untuk melakukan tindakan represif terhadap oposisi maupun kelompok minoritas. Di sinilah terlihat bagaimana konsep “keamanan nasional” dipakai untuk menyingkirkan respons kemanusiaan yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia (Hilhorst, 2013).

Sintesis Teoretis dan Temuan Empiris

Ketiga pendekatan tersebut secara sinergis menjelaskan bahwa sekuritisasi dalam konteks Myanmar bukan hanya tindakan linguistik, melainkan sebuah praktik kekuasaan yang kompleks

dan terstruktur. Tindakan sekuritisasi menjadi alat utama dalam repolitisasi bencana, di mana militer menjadikan krisis sebagai legitimasi kekuasaan alih-alih sebagai tantangan kemanusiaan.

Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mengungkap bahwa penanganan krisis di Myanmar adalah hasil dari rekayasa wacana keamanan, tetapi juga menunjukkan bagaimana tindakan tersebut secara sistematis mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi publik, dan hak asasi manusia.

Sebagai ilustrasi, berikut adalah diagram alur proses sekuritisasi yang menggambarkan transformasi isu bencana menjadi ancaman keamanan:

Diagram 1: Alur Proses Sekuritisasi di Myanmar



Keterangan: Diagram ini menggambarkan bagaimana peristiwa bencana diinterpretasikan melalui diskursus keamanan yang kemudian membenarkan kebijakan penindasan.

Kerangka Penerapan Kebijakan Darurat

Setelah proses wacana mengkonstruksi ancaman, langkah selanjutnya adalah penerapan kebijakan darurat yang mengesampingkan prosedur politik konvensional. Kebijakan tersebut mencakup penutupan akses bantuan kemanusiaan, pembatasan mobilitas warga sipil, dan penggunaan kekuatan militer untuk menekan oposisi.

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara kebijakan konvensional dan kebijakan darurat yang diterapkan oleh rezim kudeta di Myanmar:

Perbandingan Kebijakan Konvensional dan Darurat

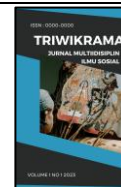
Karakteristik	Kebijakan Konvensional	Kebijakan Darurat/ Sekuritisasi
 Pendekatan	Penanganan bencana melalui bantuan kemanusiaan dan pembangunan jangka panjang	Tindakan represif yang mengedepankan keamanan nasional secara prioritas dengan mengesampingkan prinsip-prinsip kemanusiaan
 Aktor	Pemerintah sipil, lembaga bantuan internasional	Militer dan aparat keamanan yang mendukung rezim kudeta yang lebih represif dan bersifat militeristik
 Tujuan	Pemulihan kondisi sosial-ekonomi dan pembangunan berkelanjutan	Legitimasi kekuasaan dengan mengorbankan norma demokrasi
 Dampak	Meningkatkan akses bantuan dan mendukung pembangunan lokal	Menurunnya akses kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia

Tabel 1: Perbandingan Kebijakan Konvensional dan Kebijakan Darurat di Myanmar

Visualisasi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan dari proses sekuritisasi jauh berbeda dari pendekatan yang berorientasi pada kemanusiaan, mengedepankan kontrol politik dan penegakan kekuasaan demi stabilitas yang didefinisikan ulang oleh rezim kudeta.

3.2 Dampak Kebijakan Sekuritisasi terhadap Krisis Kemanusiaan

Penerapan kebijakan sekuritisasi oleh rezim militer Myanmar setelah kudeta tahun 2021 membawa dampak multidimensional terhadap krisis kemanusiaan di negara tersebut. Dalam kerangka teori sekuritisasi, negara mengubah peristiwa atau isu yang awalnya bersifat sosial atau politik menjadi ancaman keamanan yang dianggap memerlukan respons luar biasa. Namun, dalam konteks rezim otoriter, seperti Myanmar, sekuritisasi sering kali digunakan tidak hanya untuk



mengamankan negara, melainkan juga untuk mengonsolidasikan kekuasaan dengan cara menekan oposisi, membungkam kebebasan sipil, dan membatasi ruang kemanusiaan.

1. Legitimasi Pelanggaran HAM melalui Framing Keamanan

Rezim militer Myanmar memanfaatkan konstruksi diskursif atas ancaman untuk membenarkan penggunaan kekuatan represif, termasuk terhadap warga sipil dan kelompok minoritas seperti Rohingya. Dengan membingkai peristiwa krisis sosial sebagai “ancaman terhadap integritas nasional,” tindakan keras terhadap komunitas tertentu menjadi bagian dari kebijakan resmi negara. Menurut Innes (2024), praktik ini mencerminkan bagaimana sekuritisasi sering digunakan untuk mengecualikan identitas-identitas yang tidak sesuai dengan konstruksi hegemonik rezim, sehingga membuka legitimasi untuk pelanggaran hak asasi manusia secara sistemik. Dalam konteks Myanmar, framing ancaman tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga simbolik yang mewujudkan dalam pidato resmi, peraturan darurat, hingga pemberangusan media alternatif.

2. Pembatasan Bantuan Kemanusiaan dan Eksklusi Kelembagaan

Strategi sekuritisasi juga mencakup pembatasan terhadap akses lembaga bantuan kemanusiaan internasional. Pemerintah kudeta menyusun narasi bahwa campur tangan lembaga asing merupakan bagian dari agenda destabilisasi, sehingga intervensi mereka dijadikan target kecurigaan. Dalam studi kasus Turki dan Lebanon, Secen (2021) menunjukkan bahwa narasi keamanan memungkinkan negara untuk membatasi gerak lembaga-lembaga bantuan dengan dalih menjaga kedaulatan dan stabilitas politik. Di Myanmar, konsekuensi dari tindakan ini terlihat dalam penundaan distribusi bantuan, penutupan akses ke wilayah konflik, dan pembungkaman organisasi lokal yang mencoba memberi pertolongan langsung. Keputusan tersebut semakin memperparah kondisi kemanusiaan, terutama di wilayah minoritas dan zona konflik.

3. Krisis Identitas dan Polarisasi Sosial

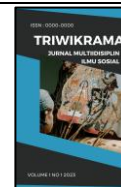
Narasi sekuritisasi juga berdampak pada konstruksi identitas nasional yang eksklusif. Dengan menjadikan kelompok-kelompok tertentu sebagai “musuh internal,” rezim Myanmar mempersempit makna identitas nasional hanya kepada kelompok mayoritas yang dianggap “patriotik.” Hal ini mengakibatkan minoritas etnis seperti Rohingya, Karen, dan Chin dikonstruksikan sebagai entitas yang membahayakan tatanan negara. Yimer dan Subaşi (2024) menggarisbawahi bahwa sekuritisasi yang menyerang aktor-aktor sipil secara langsung menimbulkan fragmentasi sosial dan memperkuat konflik horizontal, yang dalam jangka panjang menghambat proses rekonsiliasi nasional. Polarisasi ini juga mengikis ruang publik yang seharusnya menjadi wadah deliberasi demokratis, menggantinya dengan atmosfer ketakutan dan penyeragaman identitas politik.

4. Stagnasi Reformasi, Krisis Kemanusiaan yang Memburuk, dan Efek Domino Regional

Dalam jangka panjang, kebijakan sekuritisasi tidak hanya menyebabkan ketidakstabilan internal, tetapi juga berdampak pada diplomasi internasional dan keamanan kawasan. Narasi ancaman digunakan sebagai alat untuk menghalangi dialog politik dan merasionalisasi keberlanjutan kekuasaan otoriter. Ketika stabilitas didefinisikan dalam kerangka keamanan yang sempit, kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan keselamatan warga menjadi prioritas sekunder. Ini menciptakan efek domino berupa eksodus pengungsi, konflik antar komunitas, serta kegagalan diplomatik yang lebih luas di tingkat ASEAN dan PBB. Krisis Myanmar, dalam hal ini, menjadi contoh konkret dari kegagalan sistem internasional dalam menyeimbangkan antara perlindungan HAM dan kepentingan geopolitik.

3.3 Analisis Kritis dan Implikasi Politik

Kelebihan dan Keterbatasan Paradigma Sekuritisasi



Teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Copenhagen School telah memberikan kontribusi yang substansial dalam memetakan bagaimana isu-isu non-tradisional—seperti perubahan iklim, pandemi, bencana alam, serta krisis sosial-politik—dapat direkonstruksi menjadi ancaman eksistensial melalui mekanisme wacana dan tindakan politik. Dalam kerangka ini, konsep speech act menjadi elemen sentral, di mana pernyataan atau deklarasi yang diucapkan oleh aktor dominan (misalnya, elit negara atau pemimpin militer) tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki kapasitas performatif untuk menciptakan kondisi darurat yang secara normatif membenarkan tindakan di luar kewajaran (Buzan, Wæver & de Wilde, 1998).

Dalam konteks Myanmar, teori ini menawarkan lensa yang tajam untuk menganalisis bagaimana pemerintah militer pasca-kudeta merekayasa krisis menjadi ancaman keamanan demi mengonsolidasikan kekuasaan. Dengan menegaskan bahwa krisis sosial dan konflik sipil merupakan ancaman terhadap “keutuhan negara”, rezim menciptakan justifikasi untuk menerapkan langkah-langkah represif—mulai dari pelarangan demonstrasi, sensor terhadap media, hingga penahanan tokoh oposisi. Retorika seperti “demi stabilitas nasional” atau “mencegah disintegrasi negara” digunakan sebagai argumen legitimatif dalam menanggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM (Howe, 2022).

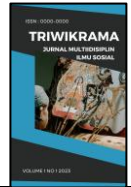
Akan tetapi, efektivitas teori sekuritisasi menghadapi tantangan besar ketika berhadapan dengan dinamika struktural yang kompleks. Kritik utama terhadap pendekatan ini menyatakan bahwa dengan terlalu fokus pada aspek diskursif, ia cenderung mengabaikan determinan material seperti struktur ekonomi-politik, ketimpangan kekuasaan, dan warisan kolonial yang memperkuat ketidakadilan sosial. Di Myanmar, persoalan sistemik seperti marginalisasi etnis minoritas (termasuk Rohingya), ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan kegagalan institusi negara dalam penyediaan layanan publik merupakan faktor penyulut konflik yang tidak bisa dijelaskan semata-mata melalui lensa wacana (Dursun-Özkanca, 2020). Artinya, teori ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain agar mampu menangkap realitas yang lebih holistik dan tidak terjebak dalam reduksionisme retorik.

Lebih lanjut, terdapat kritik bahwa teori sekuritisasi dalam praktiknya rentan untuk digunakan secara oportunistik oleh rezim otoriter. Dalam banyak kasus, sekuritisasi justru memperkuat pola governance yang eksklusif dan militeristik, serta menciptakan iklim ketakutan yang menghambat proses rekonsiliasi nasional dan demokratisasi.

Implikasi Terhadap Kebijakan Dalam Negeri

Implikasi praktis dari penggunaan paradigma sekuritisasi oleh pemerintah Myanmar sangat signifikan, terutama dalam konteks kebijakan domestik pasca-kudeta militer. Narasi ancaman telah diproduksi secara sistematis untuk mengkonstruksi situasi “darurat permanen” yang memungkinkan pemerintah bertindak tanpa pengawasan institusional. Retorika semacam ini digunakan tidak hanya untuk melawan musuh eksternal atau kelompok bersenjata, tetapi juga diarahkan pada oposisi politik sipil, organisasi masyarakat, dan media independen. Akibatnya, sekuritisasi bukan hanya menjadi alat pertahanan negara, tetapi juga menjadi mekanisme pelembagaan otoritarianisme (Howe, 2022).

Dalam jangka pendek, pendekatan ini dapat menghasilkan stabilitas semu, karena berhasil membungkam oposisi dan menekan protes publik. Namun dalam jangka panjang, hal ini justru menciptakan ketegangan sosial yang lebih dalam, memperburuk fragmentasi masyarakat, serta memunculkan perasaan keterasingan yang kuat di kalangan warga negara terhadap institusi pemerintahan. Ketika masyarakat tidak lagi memiliki ruang untuk mengekspresikan pendapat, apalagi berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, maka proses pembentukan legitimasi politik yang bersumber dari konsensus sosial menjadi lemah.



Selain itu, penggunaan retorika keamanan untuk membenarkan kebijakan domestik seringkali tidak disertai oleh transparansi, akuntabilitas, maupun evaluasi partisipatif. Hal ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, sekaligus memperbesar jarak antara rakyat dan pemerintah. Sebagaimana dicatat oleh Dursun-Özkanca (2020), penggunaan pendekatan keamanan secara berlebihan dalam konteks tata kelola publik dapat menggerus fondasi demokrasi serta mempersempit peluang untuk reformasi institusional.

Kondisi ini diperparah oleh fragmentasi elite politik dan ketiadaan saluran dialog yang memadai antara berbagai aktor sipil dan negara. Dengan demikian, strategi sekuritisasi bukan hanya tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi Myanmar, tetapi juga menjadi penghalang utama dalam pembangunan struktur negara yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyatnya.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

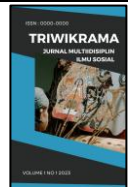
Penelitian ini menyimpulkan bahwa sekuritisasi bencana yang dilakukan oleh rezim militer Myanmar merupakan strategi politik yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara membingkai krisis sebagai ancaman keamanan. Melalui wacana keamanan yang dibentuk oleh aktor otoritatif seperti militer, krisis sosial dan politik dikonstruksi sebagai justifikasi untuk penerapan kebijakan darurat, pembatasan hak sipil, dan eksklusi kelompok minoritas. Konsep sekuritisasi dari Copenhagen School, yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis dan perspektif bencana, berhasil menjelaskan bagaimana narasi ini bekerja secara performatif dan struktural dalam memperkuat rezim otoriter. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan dalam menjelaskan faktor-faktor struktural dan ekonomi-politik yang mendasari konflik. Oleh karena itu, sekuritisasi tidak hanya menjadi alat pertahanan negara, tetapi juga berperan dalam pelembagaan kekuasaan represif yang menghambat demokratisasi dan keadilan sosial.

Saran

- A. Kebijakan dan Advokasi: Pemerintah dan organisasi internasional perlu lebih waspada terhadap retorika keamanan yang digunakan untuk membatasi ruang sipil dan akses bantuan kemanusiaan. Pendekatan berbasis hak asasi manusia harus menjadi prioritas dalam merespons krisis.
- B. Integrasi Teoritis: Untuk kajian akademik selanjutnya, teori sekuritisasi perlu dikombinasikan dengan analisis struktural dan historis guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konflik dan kebijakan otoriter.
- C. Pemberdayaan Masyarakat Sipil: Komunitas internasional harus mendukung penguatan kapasitas organisasi lokal di Myanmar agar mampu menjalankan fungsi pemantauan, advokasi, dan distribusi bantuan secara independen.
- D. Dialog Regional: ASEAN dan aktor diplomatik lainnya harus memainkan peran aktif dalam menekan rezim Myanmar agar membuka ruang dialog dan menghentikan penggunaan sekuritisasi untuk menindas oposisi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Balzacq, T. (2011). *Securitization theory : how security problems emerge and dissolve*. Routledge.
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). Security: a New Framework for Analysis. *International Journal*, 53(4).



- Hilhorst, D. (2013). *Disaster, Conflict and Society in Crises*. Routledge.
- Howe, B. (2022). Non-traditional Security Leadership and Cooperation in the Face of Great Power Conflict: The Rise of New Actors. *Asian Journal of Peacebuilding*, 10(1), 243-270. <https://doi.org/10.18588/202202.00a211>
- Innes, A. (2024). Un-siloing securitization: an intersectional intervention. *International Politics*. <https://doi.org/10.1057/s41311-024-00584-7>
- Oya Dursun-Özkanca. (2021). The Nexus Between Security Sector Governance/Reform and Sustainable Development Goal-16. In *OAPEN (The OAPEN Foundation)*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1v3gqvn>
- Secen, S. (2020). Explaining the politics of security: Syrian refugees in turkey and lebanon. *Journal of Global Security Studies*, 6(3). <https://doi.org/10.1093/jogss/ogaa039>
- Yimer, N. A., & Subaşı, T. (2024). The dynamics of securitization and desecuritization in Ethiopia: the case of civil society organizations (CSOs). *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2347692>